

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. OKP Pemuda Pancasila di Sumatera Utara dibentuk pada tahun 1960. Oleh Efendi Nasution, dengan dasar perjuangan pemuda untuk menghadang PKI, yang berkantor di Jl Thamrin. Setelah Pemuda Pancasila terbentuk, maka terbentuklah OKP Ikatan Pemuda Karya pada tahun 1969, karena ketidakcocokan pembagian kerja antara Olo Panggabean dan pimpinan Pemuda Pancasila. Kantor IPK di Jl. Sekip Medan Petisah, selanjutnya disusul terbentuk AMPI dan FKPI di Kota Medan pada era tahun 1980-an.
2. Ruang publik yang dikuasai oleh OKP di Kota Medan yaitu mengelola parkir baik di pusat perbelanjaan ataupun jalan protokol, kemudian keamanan kios, kuliner, pertokoan dan Pasar tradisional. Pola okupasi yang dilakukan adalah melakukan *patron-client* dengan pemerintah, sehingga diberikan izin secara lisan untuk mengelola satu daerah dengan kesepakatan tender.
3. Kelompok OKP di Kota Medan melakukan penguasaan dengan bekerja sama terhadap pemerintah atau swasta, pemerintah atau swasta memberikan *tender* kepada salah satu OKP agar mengamankan proyek. Kemudian penyaluran barang material proyek-proyek tersebut harus

melalui OKP sehingga proyek lancar dan dapat menghidupi kesejahteraan OKP dan anggotanya.

## 5.2. Rekomendasi

1. Bagi pemerintah khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga, harusnya OKP yang pada saat ini eksis di Kota Medan seperti PP, IPK, AMPI dan FKPI harusnya diberikan pembekalan agar kembali mengedepankan ideologi Pancasila, karena pada awal terbentuknya juga sebagai wadah untuk mempersatu pemuda agar melindungi kehidupan bernegara, sehingga masyarakat luas lebih nyaman dan tentram hidup berdampingan dengan OKP.
2. Bagi OKP, harusnya melakukan kerjasama dengan cara bijaksana dan arif, bukan dengan pengrusakan ataupun konflik kekerasan, sehingga OKP dipandang lebih kepada organisasi atau lembaga yang baik bukan sebagai sarang tempat berkumpulnya para preman dengan cover organisasi. Harusnya juga mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi
3. Bagi OKP seharusnya sering melakukan partisipasi sosial, yaitu membantu masyarakat agar pandangan masyarakat kepada anggota OKP lebih dihargai dikarenakan kehidupan sosialnya, bukan karena terror dan anarkisme yang dilakukan oleh OKP. Disamping itu, OKP harus mendapatkan pendidikan karakter yang dilakukan baik pemerintah dalam hal ini Dispora dan tokoh masyarakat, agar beradaptasi dan lebih bijak dalam diplomatik proyek tender, bukan hanya mengandalkan otot dan massa.

4. Bagi masyarakat, harusnya diberikan pemahaman tentang sinergitas antara masyarakat dan OKP harus ditingkatkan dalam membangun bangsa, sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat.

